

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESISI

2.1 Kajian Pustaka

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel.2.1 Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Nama	Joko Tri Nugraha	Roni Faslah	Nuzesep Almigo
Jenis Luaran Laporan Peneliti	Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media	Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis	Jurnal PSYCHE
Tahun	2018	2013	2004
Universitas	Unversitas Tidar	Alumni Falkutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta	Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma Palembang
Judul	E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)	Pengaruh Motivasi kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan PT.Kabelindo Mur	Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Produktivitas Kerja Karyawan
Latar Belakang Historis	Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government, pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan pelayanan publik berbasis e-government. Di tingkat nasional, sudah banyak pemerintah daerah yang memiliki inisiatif untuk mengimplementasikan e-government. Meski demikian, kondisi di lapangan menemukan perbedaan yang terjadi antar daerah dengan berbagai alasan, seperti faktor keterbatasan anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. E-government yang dikembangkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan tanpa disertai peningkatan kualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan dari 28 pengelola web OPD di Kabupaten Sleman, teknik analisis data menggunakan teknik flow model analysis.	peneliti ini bertujuan untuk memenuhi apakah terdapat pengaruh antara motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pada karyawan PT.Kabelindo Murni,Tbk. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasionalz	This research was aimed to know the relation between job satisfaction, reward, and year of service with the work productivity. Hypothesis raised shall be as follows : There is a relation between job satisfaction, reward, and year of service with the work productivity. Research's instruments used is job satisfaction questionnaire. This research uses the technique of purposive random sampling in election of subject research. The subject of this research is 82 employees of PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. The data were analyzed using regression analysis. The result of data analysis show : There is a relation between job satisfaction with the work productivity. The increase of job satisfaction followed by the increase of work productivity ($r = 0,252$; $p = 0,011$.)
Konteks Kekinian Terkait Dengan Topik	Cepat lambatnya evolusi sebuah pemerintahan dari knowledge society menuju e-government sangat tergantung dari seberapa	Analisis koefisien determinasi (R ²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu model menerangkan variasi variabel dependen. Diketahui	Mencari solusi bagi kepentingan bersama sudah ditunjukkan dengan adanya perhatian terhadap permasalahanpermasalahan

	peka pemerintah dan masyarakatnya dalam membaca tandatanda zaman (tren atau kecenderungan). Dukungan penerapan e-government dalam pelayanan publik sudah diberikan Pemkab Sleman meski belum optimal, hal ini karena belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus di samping alokasi anggaran yang berbeda-beda di setiap OPD. Pada sisi kemampuan, secara umum tingkat literacy pegawai Pemkab Sleman masih rendah terutama para pegawai senior. Sementara pada sisi nilai, para pengelola e-government di Pemkab Sleman sudah memahami manfaat dan pentingnya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.	nilai R2 adalah 0.381. jadi kemampuan dari variabel motivasi kerja dan disiplin kerja untuk menjelaskan produktivitas kerja secara silmutan yaitu 38,1%, sedangkan sisanya sebesar 61,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.	dari karyawan. Pada dasarnya pandangan dan sikap karyawan PT. Pusri, sabagai tata nilai yang harus diusahakan agar dapat menjadi budaya perusahaan. Hal ini mengingat bahwa, apabila budaya perusahaan dimanajemeni dengan baik diharapkan dapat berperan sebagai (PT. Pusri, 2001): 1) pedoman yang baku bagi sikap dan perilaku setiap karyawan dalam Vol. 1 No. 1, Desember 2004 Kepuasan Kerja, Imbalan, Masa Kerja, dan Produktivitas Kerja Karyawan 58 Beckerja; 2) pengikat keutuhan organisasi, 3) kebanggaan karyawan, dan 4) keseimbangan jiwa perusahaan dalam alih teknologi.
Teori-Teori Yang Telah Dan Sedang Dipergunakan Peneliti Lain	Pengertian E-Government	Pengertian produktivitas kerja	Pengertian produktivitas kerja
Mendudukan Termonologi- Termonologi Yang Relavan Yang Dipergunakan Dalam Pembagian Peneliti Sejenis (Terminology) Metode Penelitian	Metode kualitatif deskriptif	Metode survei dengan pendekatan korelasinonal	metode kuantitatif dengan menggunakan teknik sempel
Penjelasan Bukti-Bukti Terkait Pentingnya Riset Ini (Significant) Hasil Penelitian	Sosialisasi penggunaan E-Government yang paling baik dan efektif adalah dari mulut ke mulut, dalam arti bahwa pengalaman sukses seseorang berinteraksi melalui pemerintah melalui fasilitas teknologi.informasi merupakan hal yang sangat berharga.	Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara motivasi kerja dan produktivitas artinya jika motivasi kerja tinggi, maka produktivitas kerja juga akan tinggi dan sebaliknya.	PT.Pusri seharusnya memberikan fasilitator sebagai ajang komunikasi antar karyawan dengan pihak permasalahan anantara karyawan maupun dengan pihak atasan menjadi lebih baik. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan social pada pekerjaan.
Penjelasan Keunggulan Penelitian Yang Kita Lakukan	E-Government	Produktivitas kerja	Produktivitas kerja
	Verfokus pada pengertian E-Governmet, bahwa sistem E-Government dapat mempermudah dalam proses pelayanan administrasi	Berfokus pada pengertian Produktivitas kerja adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang di perlukan	Berfokus pada pengertian produktivitas kerja adalah suatu ukuran dari pada hasil kerja atau kinerja seseorang dengan proses input sebagai masukan dan output sebagai keluaran yang merupakn indikator dari pada konerja karyawan dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu organiasi
	Keunggulan dalam penelitian saya bahwa dengan adanya penerapan sistem Elektronik dalam pelayanan admistrasi pegawai dapat mudah untuk mendapatkan data yang sudah ada.	Keunggulan dalam peneliti saya bahwa dengan adanya produktivitas kerja, adanya hubungan kepuasan pada pegawai dalam tingkat kinerja nya.	Keunggulan dalam penelitian saya dapat melihat kepuasan kerja pegawai, dapat meningkatkan hubungan anantara atasan dan karyawan.

2.1.2 Pengertian Administrasi

Administrasi berasal dari kata *to administer*, yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi.

Dalam arti sempit, administrasi merupakan penyusunan dan catatan data informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali.

Dalam arti luas, administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan.

Pengertian Menurut Pendapat Sondang P. Siagian Yang Dikutip Dari Buku Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Dalam Perspektif Idealitas Domestik

“ administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya”. **(Drs.HNandang Saefudin Zenju 2008)**

Pandangan peneliti mengemukakan administrasi adalah suatu proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah di persiapkan sarana dan prasana yang sudah tentukan sebelumnya agar memperguna hasil yang baik.

Pengertian Menurut Pendapat Harris Muda, Yang Dikutip Dari Buku Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Dalam Perspektif Idealitas Domestik

“ administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya, mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat dan mencatat

(membukukan) setiap perubahan/kejadian yang terjadi dalam organisasi itu”.(Drs.HNandang Saefudin Zenju 2008)

Pandangan peneliti mengemukakan administrasi adalah suatu aturan pekerjaan yang mencakup aturan yang berhubungan dengan surat –menyurat, catat-mencatat, tulis-menulis dan sebagainya. Untuk mengurus segenap tindakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan baik.

Pengertian Menurut Leonard D.White Yang Di Kutip Dari Buku Sahya Anggara Dari Buku Ilmu Administrasi Negara Pengertian Administrasi.

“ Admnistrasi adalah suatu proses yang terdapat secara umum dalam segala tata usaha kelompok manusia, usaha negara atau swasta, usaha kecil ataupun besar”.(Anggara n.d.)

Padangan diatas peneliti mengemukakan administrasi adalah suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dua orang atau lebih. Baik itu organisasi kecil maupun organisasi besar yang akan menjalankan suatu kegiatan baik itu kegiatan besar ataupun kegiatan kecil untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Administrasi sebagai penata atau instruksi menunjukan keseluruhan orang-orang yang melakukan kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki suatu posisi yang sudah ditentukan dalam rangkaian pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan.admiistrasi adapun administrasi senantiasa sebagaimana sebagian proses kegiatan-kegiatan,pemikiran dan tujuan-tujuan yang akan di laksanakan pada suatu kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana.

2.1.3 Pengertian Administrasi Negara

Administrasi publik terdiri dari dua suku kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *ad* yang artinya intensif dan *ministrare* yang artinya adalah melayani. Administrasi negara atau administrasi publik sebagian dari keseluruhan pada lembaga-lembaga pemerintahan pusat atau pun pemerintahan daerah yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan kebijakan pemerintahan. *Public administration* diterjemahkan administrasi negara sebagai mana perwujudan untuk memperhatikan kegiatan negara.

Pengertian administrasi menurut Pasoling, 2007 yang dikutip oleh Erika Revada dalam buku teori administrasi publik.

“Administrasi Publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif” (Revida 2020)

Pandangan peneliti mengemukakan administrasi publik adalah suatu kerja sama dalam organisasi atau pada lembaga-lembaga untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah upaya dalam penyelenggaraan mekanisme pelaksanaan pelayanan publik atau masyarakat secara efisien dan efektif.

Pengertian Menurut Pfiiner dan Presthus seperti yang dikutip Pamudji (1985:21) yang dikutip Sahya Anggara dari buku ilmu administrasi negara.

In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, and compassing innumerable skills and techniques which give order and purpose to the efforts to large number or people” (singkatnya, administrasi publik adalah proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik, dan kompas keterampilan dan teknik yang tak terpisahkan yang memberikan ketertiban dan tujuan bagi pekerjaan bagi sejumlah besar orang) (Anggara n.d.)

Pandangan diatas peneliti mengemukakan bahwa administrasi publik adalah suatu ilmu seni yang mempelajari dalam menyelenggarakan sistem pelayanan administrasi publik untuk memberikan suatu kebijakan publik dalam mengorientasikan keterampilan dan menertibkan dalam suatu tujuan organisasi agar dapat sesuai dengan rencana yang telah di rancang sebelumnya.

Administrasi publik dapat memperhatikan wujudnya tata pemerintahan yang demokratis dan amanah, karna itu, admnistrasi publik sangat penting untuk kemampuan ilmuwan untuk mewujudkan tata pemerintahan

2.1.4 Pengertian E-Government

Pemerintahan elektronik atau E-Government (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronic government*, juga disebut E-Gov, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi interna, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

E-Government dalam pelayanan publik menjadi sistem teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu alat yang dipergunakan untuk memutuskan suatu hubungan yang sulit antara publik dan pemerintah. Dalam hal pelayanan memberikan variasi adanya penerapan teknologi informasi berbasis elektronik agar mempermudah dalam proses pelayanan khususnya pada pelayanan administrasi. Menurut Keppres No.20

Tahun 2006.E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efesiensi,efektivitas,trasparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Prof.Dr.Deddy Mulyadi,M.Si,Dr.Hendrikus,T.Gedeona,S.I.P,M.Si dan Muhammd Nur Afandi.,A.Pd.,M.T.dalam buku Administrasi publik untuk pelayanan.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi,khususnya internet,untuk menjadikan pelayanan publik lebih nyaman, berorientasi kepada konsumen,pembayaran yang efektif dan sama sekali berbeda dan jalan yang lebih baik.(**Prof.Dr.Deddy Mulyadi,M.Si.,Dr.Herdrikus T.Gedeona,S.I.P.,M.Si.,Muhammad Nur Afande,S.Pd. 2018**)

Pandangan diatas peneliti mengemukakan E-Government adalah , suatu program elektronik pemerintah yang dapat memberikan pelayanan adminsitrasi yang menggunakan alat perangkat lunak atau perangkat keras untuk mengubah pola pemikiran atau pun perilaku masyakat agar medapatkan pelayanan publik efektif dan efesien.

Menurut abiding,Zainal:2001,dalam Azri,Idham:2002 di kutip oleh Prof.Dr.Deddy Mulyadi,M.Si, Dr.Hendrikus T.Hendrikus T.Gedeone,S.I.P,M.Si dan Muhammad Nur Afandi,S.Pd.,M.T dalam Buku Administrasi Publik untuk pelayanan.

E-Government yaitu sebagai salah satu sistem manajemen informasi dalam pelayanan masyarakat yang berbasisi internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberikan akses layanan publik oleh instansi pemerintah.(**Prof.Dr.Deddy Mulyadi,M.Si.,Dr.Herdrikus T.Gedeona,S.I.P.,M.Si.,Muhammad Nur Afande,S.Pd. 2018**)

Pandangan diatas peneliti mengemukakan E-Government adalah pemerintah menyediakan sistem adminnistrasi secara online atau berbasis elektronik untuk mempermudah dan mempercepat akses pelayanan dan dengan adanya penyediaan administrasi elektronik data yang sudah di ajukan masyarakat pada pelayanan

pemerintahan dapat terekam dan jika masyarakat meminta data yang pernah diajukan pegawai pelayanan dengan mudah dan cepat untuk mencari data tersebut.

Pengertian E-Government Menurut Hartoni (2010) yang dikutip oleh Joko Tri Nugraha dalam jurnal E-Government dan Pelayanan Publik (Studi tentang elemen sukses pengembangan E-government di pemerintahan kabupaten sleman)

E-Government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga pemerintahan serta stafnya. (Nugraha 2018)

Padangan diatas peneliti pengemukakan bahwa E-Government sistem pemerintah dalam berbasis elektronik dapat mendukung sistem manajemen dan pola kerja pemerintah yang efektif dan efisien. Teknologi informasi dapat mendorong kemampuan masyarakat dalam kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

2.1.4.1 Manfaat Dan Tujuan E-Government

E-Government memiliki banyak manfaat guna menunjang efektifitas dan efisiensi pelayanan publik:

1. meningkatkan serta memperbaiki kualitas pelayanan public pemerintah kepada *stakeholder* seperti masyarakat, kalangan bisnis dan industry terutama terkait dengan hal kinerja pemerintah , efektifitas dan efisiensi di kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan tranparansi, penegndalian,serta keterbukaan penyelenggaraan pemerintah terkait dalam penerapan konsep good governance.

3. Adanya pengurangan signifikan total biaya administrasi, adanya relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun kepada stakeholder-nya untuk keperluan kegiatan pemerintah sehari-hari
4. Memberikan peluang pemerintahan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru malalu interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang baru yang merupakan jawaban dari berbagai permasalahan yang dihadapi secara lebih cepat dan tepat dengan perubahan peruhan global dan tren.
6. Memperdaya masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan demokratis.

2.1.4.2 Model Penyemapaian E-Government

1. Government to citizen atau government to customer (G2C) adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat,memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah.
2. Government to business (G2B) adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah
3. Government to government (G2G) adalah kemungkinan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintah melalui bisnis data yang terintegrasi.

2.1.4.3 Startegis Dalam Menerapkan Sistem E-Government

Pemerintah sendiri sudah memiliki startegis dalam menerapkan sistem e-govrenment, yaitu :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintahan dan pemerintahan otonom secara holistik dengan cara menyiapkan SDM yang terbiasa dengan teknologi
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi

2.1.4.4 Strategis Dalam Menerapkan Sisitem E-Government

Pemerintah sendiri sudah memiliki startegis dalam menerapkan sistem e-government, yaitu :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata diseluruh wilayah Indonesia.
2. Menata sistem dan proses kerja permerintah dengan pemerintah otonom secara horlik dengan menyiapkan SDM yang terbiasa dengan teknologi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap

4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi.

Dengan adanya penerapan sistem e-government telah mengubah paradigma administrasi negara yang mana beroprasinya organisasi publik harus mendasar diri dengan profesionalisme layaknya organisasi bisnis. Dalam hal ini e-government dapat berpengaruh pada proses kinerja karyawan atau pegawai untuk mempermudahnya kerja , cepat memproses pelayanan masyarakat.

2.1.5 Produktifitas Kerja

Produktivitas kerja diartikan sebagai tingkat perbandingan antara hasil keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Keluaran (*output*) pada umumnya diklarifikasi menjadi barang ataupun jasa atau bisa dibidang rasio . Masukan (*input*) terdiri dari tenaga kerja, bahan baku,tanah, modal, teknologi dan keahlian wirausaha dengan kata lain pada sumber daya. Indonesia perlu mengembangkan keunggulan komperatif yang dinamis. Dengan adanya Sumber daya manusia, modal dan teknologi dengan menempati posisi yang sangat stategis dalam mewujudkan tersedianya barang dan jasa dapat munculnya sumber daya manusia yang berkualitas produktif dan professional.

Menurut Blecher (Wibowo 2008: 241) pengertian Produktivitas kerja yang di kutip oleh Rovi Faslah dari jurnal pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pada karyawan PT.Kabelindo mur Alumni Falkutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

“ Produktivitas kerja adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang di perlukan.”(**Roni Faslah n.d.**)

Pandangan diatas peneliti mengemukakan produktivitas kerja yaitu, suatu ukuran sumber daya manusia yang dapat dilihat dari suatu hasil perhitungan organisasi dengan melihat hasil keluaran (*output*) dan hasil perhitungan organisasi dengan hasil masukan (*input*) yang di perlukan.

Menurut sedarmayanti (2001) pengertian produktivitas kerja yang di kutip oleh Nuzsep Almigo dalam jurnal hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas kerja karyawan di falkultas psikologi universitas bina darma Palembang

“ Produktivitas kerja adalah suatu ukuran dari pada hasil kerja atau kinerja seseorang dengan proses input sebagai masukan dan output sebagai keluaran yang merupakn indikator dari pada kinerja karyawan dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. “ (Almigo 2004)

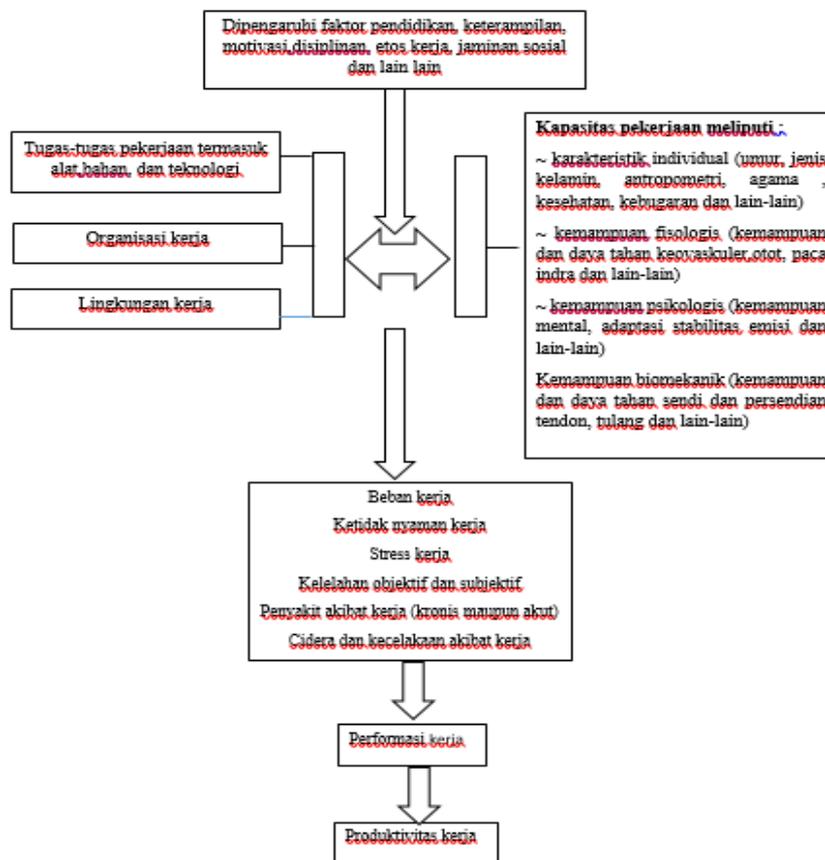
Menurut peneliti mengemukakan produktivitas kinerja adalah adanya kaitan dengan efisiensi penggunaan pemasukan (*input*) untuk memproduksi barang atau jasa sebagai salah satu konsep yang disebut dengan mental yang dimiliki dengan nilai mutu kehidupan kerja untuk meningkatkan perbaikan

2.1.5.1 Pengukuran Produktifitas

Pengukuran produktivitas secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1. Produktivitas Total** : adalah perbandingan antara total keluaran (*output*) dengan total masukan (*input*) persatu waktu. Dalam perhitungan produktivitas total, semua faktor masukan (tenaga kerja, kapital bahan, energi) terhadap total keluaran harus diperhitungan.

2. **Produktivitas Parsial** : adalah perbandingan dari keluaran dengan satu jenis masukan atau input persatu waktu. Seperti upah tenaga kerja, kapital, bahan ,energy, beban kerja, dan lain-lain.



Gambar 2. 1 Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas kerja(sumber:Tarwaka dkk)

Produktivitas kerja dapat mempengaruhi lima faktor yaitu pada pendidikan,keterampilan,motivasi disiplin,etos kerja,jaminan sosial. Dengan adanya Satu beban kerja adalah volume pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja baik berupa fisik maupun mental dan menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini harus adanya

kemampuan individu agar tidak terjadinya hambatan ataupun gagal dalam pelaksanaan kerja.

2.1.5.2 Konsep Produktivitas Kerja Didasarkan Asumsi :

1. Suatu organisasi bisnis adalah suatu badan yang mampu menentukan nasibnya.
2. Organisasi yang produktif akan menyingkirkan organisasi yang kurang produktif.
3. Organisasi harus berkembang supaya bertahan hidup.
4. Kesehatan organisasi diukur berdasarkan gambaran keuntungan jangka pendek dan jangka panjang.
5. Kualitas yang rendah akan menyebabkan kerugian (Balk dalam Kasim,1989:19)

Produktivitas kerja memiliki dua dimensi, yaitu efektivitas yang mengarahkan kepada pencapaian target yang kaitan dengan waktu, kualitas, kuantitas. Dimensi selanjutnya ada efisiensi yang berkaitan dengan upaya dalam perbandingan input dengan realisasi penggunaan atau bagaimana dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh karyawan. Dengan Secara umum produktivitas mengandung pengertian perbandingan terbalik antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input) berdasarkan hal tersebut, maka formula produktivitas dapat dinyatakan sebagai tersebut

$$P = \frac{O}{I}$$

Keterangan :

P : Produktivitas

O : Output

I : Input

Hasil dari perhitungan produktivitas kerja tersebut dapat menggambarkan pencapaian produktivitas kerja yang dilakukan karyawan, apakah hasil dari kinerja karyawan menghasilkan hasil yang standar atau belum pada perusahaan. Dengan sekaligus dalam hasil tersebut dapat mengevaluasi kinerja yang kurang maksimal pada perusahaan.

Pengukuran produktivitas secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu produktivitas kerja adalah suatu

1. produktivitas total : adalah perbandingan antara total keluaran (*output*) dengan total masukan (*input*) persatuan waktu. Dalam perhitungan produktivitas total, semua faktor masukan (tenaga kerja, kapital, bahan, energi) terhadap total

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi secara ilmiah memerlukan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu sebagai landasan teori menurut para ahli pada Pengaruh E-Government Terhadap Produktivitas Kerja Di Dinas Komunikasi Dan Informasi, Kota Bandung.

Dr.Imas Sumiati,Dra.M.Si (2019;8-9) dalam bukunya yang berjudul “E-Government”

Kerangka Arsitektur E-Government terdiri empat lapis struktur,yakni:

- a. Akses jaringan telekomunikasi,jaringan internet dan media komunikasi lainnya yang terdapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik
- b. Portal pelayanan public. Situs *web* pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengelolaan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik sejumlah instansi yang terkait.

- c. Organisasi pengelolaan dan pengelolaan informasi. Organisasi pendukung (*back office*) yang mengelola, menyediakan dan mengelola transaksi informasi dan dokumen elektronik
- d. Infrastruktur Dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang di perlukan untuk mendukung pengelolaan, mengelola, transaksi, dan penyaluran informasi (antar *back office*, antar portal pelayanan publik dengan *back office*), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman dan tercepat (Dr. Imas Sumiati, Dra. 2019)

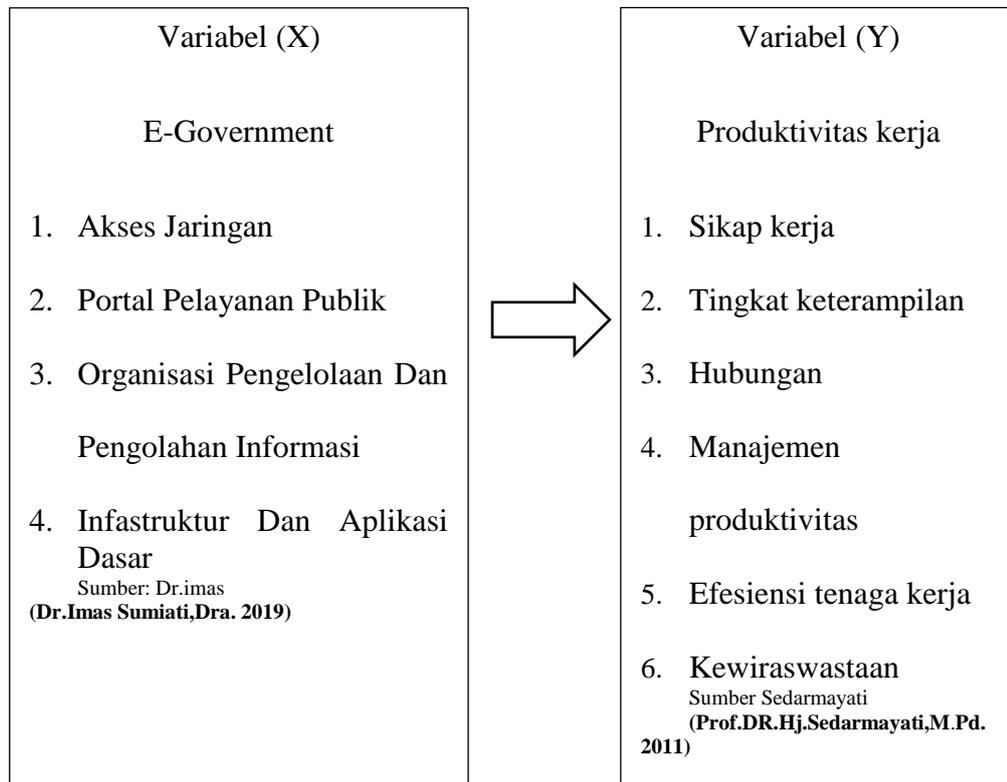
Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Kerangka Arsitektur E-Government yaitu, penataan system manajemen dan proses kerja, pemahaman kebutuhan masyarakat, penguatan kerangka kebijakan dan pemaparan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kebijakan E-Government dilaksanakan secara sistematis dan terpadu. Dengan demikian diperlukannya perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan dan pengevaluasian anggaran pengembangan E-Government yang baik, sehingga dapat terlaksana untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Balai dalam buku yang berjudul “ tata kerja dan produktivitas kerja “ pengembangan produktivitas Daerah, enam faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja adalah :

1. Sikap kerja : seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (Shift Work): dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam suatu shif.
2. Tingkat keterampilan, yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam manajemen dan supervise serta keterampilan dalam teknik industry.
3. Hubungan antara tenaga kerja dan pemimpin organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pemimpin organisasi dengan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkungan pengawasan mutu dan panitia mengenai kerja unggul.
4. Manajemen produktivitas, yaitu: manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas.
5. Efisiensi tenaga kerja seperti : perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas.

6. Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada pada jalur benar berusaha.
(Prof.DR.Hj.Sedarmayati,M.Pd. 2011)

Bahwa produktivitas kerja berkaitan dengan tingkat kepuasan instansi atau perusahaan pada karyawan ataupun pada pelayanan masyarakat, dengan hal ini adanya tingkat kepuasan pada produktivitas kerja dapat dilihat dari segi baiknya kinerja karyawan atau dari buruknya kinerja karyawan untuk menghadapi kegiatan yang akan di hadapinya.dengan hal ini untuk meningkatkan kepuasan produktivitas kerja harus nya ada dorongan dari seorang pemimpin yaitu dengan adanya motivasi pada karyawan.



2.3 Hipotesis

2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan tolak dari kerangka pemikiran diatas, maka penelitian hipotesis peneliti sebagai berikut: **Ada Pengaruh E-Government Terhadap Produktifitas kerja Di Dinas Komunikasi Dan Informasi, Kota Bandung.**

Hipotesisi penelitian di atas bersifat substantive dan verbal artinya masih bersifat kata atau verbal dan substantive atau langsung ke permasalahan belum bisa di uji. Oleh karena itu harus diterjemahkan ke dalam hipotesis statistic yang sudah diprioritaskan sebagai berikut:

2.3.2 Hipotesis Statistik :

a. $H_0 : \rho_s = 0$, artinya Pengaruh E-Government : Produktifitas pegawai = 0, pengaruh E-Government (X) Produktifitas pegawai (Y) artinya Pengeruh E-Government Terhadap Produktifitas pegawai tidak ada pengaruh

b. $H_1 : \rho_s \neq 0$, artinya pengaruh E-Government : Produktifitas Pegawai $\neq 0$, artinya pengaruh E-Government Terhadap Produktifitas pegawai ada perbedaan pengaruh.

c. Definisi Oprasional Variabel

Berdasarkan hipoteisi diatas maka dalat disimpulkan bahwa definisi oprasional menjelaskan konsep-konsep yang masih adbstrak dari hipotesis supaya bisa diukur dan dipahami oleh orang lain. Adapun definisi oprasioanl peneliti adalah:

1. E-Government (X) adalah teknologi informasi memberikan hal penting dalam membantu pihak pelayanan dalam proses pendataan administrasi

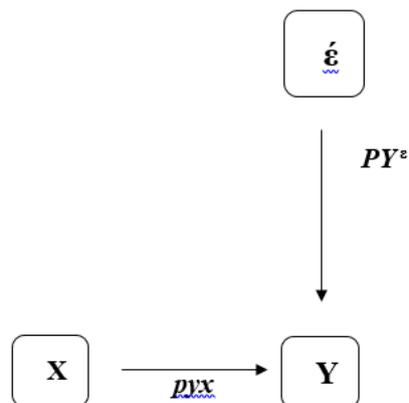
Adapun kerangka arsitektur e-government terdiri empat lapis struktur, yakni :

- a. Akses jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya yang terdapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik
 - b. Portal pelayanan public. Situs *web* pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengelolaan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik sejumlah instansi yang terkait.
 - c. Organisasi pengelolaan dan pengelolaan informasi. Organisasi pendukung (*back office*) yang mengelola, menyediakan dan mengelola transaksi informasi dan dokumen elektronik
 - d. Infrastruktur Dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar *back office*, antar portal pelayanan publik dengan *back office*), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman dan tercepat
2. Produktivitas Kerja (Y) merupakan pencapaian hasil kerja yang karyawan dengan standar atau belum tercapainya produktivitas kerja dalam suatu progress kerja dan pada pelayanan masyarakat.

Menurut Balai pengembangan produktivitas Daerah, enam faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja adalah :

1. Sikap kerja : seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (Shift Work): dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam suatu shift.

2. Tingkat keterampilan, yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam manajemen dan supervise serta keterampilan dalam teknik industry.
3. Hubungan antara tenaga kerja dan pemimpin organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pemimpin organisasi dengan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkungan pengawasan mutu dan panitia mengenai kerja unggul.
4. Manajemen produktivitas, yaitu: manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas.
5. Efisiensi tenaga kerja seperti : perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas.
6. Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada pada jalur benar berusaha.



Gambar 2. 2 paradigma penelitian

Keterangan Gambar :

X : Variabel E-Government

Y : Variabel Produktifitas pegawai Di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung

ϵ : Pengaruh Dari Variabel Lain Yang Tidak Dapat Dijelaskan Dengan Penelitian

P_{yx} : Besarnya E-Government Dari Variable Prouktivitas Pegawai

PY^ϵ : Besarnya Pengaruh Dari Variable Lain Tidak Dapat Dijelaskan Dalam Penelitian

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka untuk mempermudah dalam pengajuan hipotesis, peneliti mengajukan definisi oprasional sebagai berikut :

1. E-Government (X) adalah teknologi informasi memberikan hal penting dalam membantu pihak pelayanan dalam proses pendataan administrasi
Adapun kerangka arsitektur e-government terdiri empat lapis struktur, yakni :
 - a) Akses jaringan telekomunikas,jaringan internet dan media komunikasi lainnya yang terdapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik
 - b) Portal pelayanan public. Situs *web* pemerintaha pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengelolaan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik sejumlah intansi yang terkait.
 - c) Organiasi pengelolaan dan pengelolan informasi. Organiasi pendukung (*back office*) yang mengelola,menyediakan dan mengelola transaksi informasi dan dokumen elektronik
 - d) Infrastruktur Dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana,baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang di perlukan untuk mendukung

pengelolaan, mengelolah, transaksi, dan penyaluran informasi (antar *back office*, antar portal pelayanan publik dengan *back office*), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman dan tercepat

Produktivitas Kerja (Y) merupakan pencapaian hasil kerja yang karyawan dengan standar atau belum tercapainya produktivitas kerja dalam suatu progress kerja dan pada pelayanan masyarakat.

2. Menurut balai pengembangan produktivitas Daerah, enam faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja adalah :

1. Sikap kerja : seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (Shift Work): dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam suatu shif.
2. Tingkat keterampilan, yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam manajemen dan supervise serta keterampilan dalam teknik industry.
3. Hubungan antara tenaga kerja dan pemimpin organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pemimpin organisasi dengan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkungan pengawasan mutu dan panitia mengenai kerja unggul.
4. Manajemen produktivitas, yaitu: majemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas.
5. Efisiensi tenaga kerja seperti : perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas.
6. Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada pada jalur benar berusaha.

3. Pengaruh yang signifikan menunjukkan keterkaitan atau Pengaruh E-Government Terhadap Produktivitas Kerja Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Bandung.